



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 15 Maret 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.15 WIB s.d 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Membicarakan mengenai upaya peningkatan kinerja pelabuhan serta Moda Transportasi Laut dan Penyeberangan di Indonesia; 2. Membicarakan mengenai implementasi UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran terutama terkait dengan upaya peningkatan keselamatan pelayaran dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa; 3. Membicarakan mengenai upaya untuk mengatasi antrean di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheuni serta antisipasinya.
Ketua Rapat	: Muhidin M. Said
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, PLH Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 10.15 WIB karena kuorum belum terpenuhi, rapat diskors selama 30 menit. Skors dicabut setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Dirut PT. ASDP Indonesia Ferry pada hari ini adalah untuk membicarakan mengenai upaya peningkatan kinerja pelabuhan serta Moda Transportasi Laut dan Penyeberangan di Indonesia; membicarakan mengenai implementasi UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terutama terkait dengan upaya peningkatan keselamatan pelayaran dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa; membicarakan mengenai upaya untuk mengatasi antrean di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheuni serta antisipasinya.
3. Ketua mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (persero) untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Terkait antrean kendaraan di penyeberangan Merak-Bakauheuni, Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinannya serta meminta Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan pengusaha jasa penyeberangan untuk mengoptimalkan koordinasi dalam upaya mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang.
2. Guna memecahkan permasalahan antrean di pelabuhan Merak-Bakauheuni dan mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang, Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan pengusaha jasa penyeberangan antara lain:
 - a. Perbaikan manajemen terutama terkait dengan Jadwal Olah Perbaikan (*docking*) dan Jadwal Olah Guna yang tidak mengganggu operasional penyeberangan.
 - b. Penambahan kapasitas layanan Dermaga.
 - c. Penambahan kapasitas angkut operasi penyeberangan.
 - d. Peningkatan kualitas layanan tiketing (*e-ticket*).
3. Terkait data bahwa sebagian besar kapal yang beroperasi di penyeberangan Merak telah berusia di atas 20 tahun maka dalam upaya meningkatkan keselamatan penyeberangan, Komisi V DPR RI mendorong pengusaha jasa penyeberangan untuk melakukan peremajaan armada penyeberangan yang dimilikinya.
4. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengimplementasikan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta berbagai peraturan pelaksanaannya secara menyeluruh khususnya terkait Pemisahan fungsi Regulator dan Operator di pelabuhan penyeberangan serta pembentukan Otoritas Pelabuhan (OP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), penetapan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan pembentukan Syahbandar.
5. Terkait amanat UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, Komisi V DPR RI akan mengagendakan Rapat Koordinasi dengan Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian. Meneg BUMN dan Gubernur Bank Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 15 Maret 2011

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

ttd

SUNARYO

**DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

ttd

SUROYO ALIMOESO

**PLT. DIRUT PT. ASDP
INDONESIA FERRY,**

ttd

SIRAJUDDIN SAINI

KETUA RAPAT,

ttd

MUHIDIN M. SAID

Jakarta, 31 Januari 2011,
KETUA RAPAT,

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

Jakarta, 21 September 2010

KETUA RAPAT,

IR. H. MULYADI

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

**MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT**

K E T U A,

IR. A. HELMY FAISHAL ZAINI, SE

SOEHARSO MONOARFA, MA

.....

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

**KEPALA BADAN
SAR NASIONAL,**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
LUMPUR SIDOARJO,**

DR. IR. SRI WORO B. HARIJONO, MSC

MARSDYA. WARDJOKO

SOENARSO

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,



DRS. SOEROYO ALIMOESO

KETUA RAPAT,

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT,

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA,

SUNARYO, SH

IR. HARRY BAKTI SINGAYUDA, MM

DIRJEN BINA MARGA,

DIRLANTAS MABES POLRI,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc

DRS. DJOKO SUSILO, SH, MSi

MARSDYA. WARDJOKO

